



LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2026

DAFTAR ISI.....	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.3 Metode Pengumpulan Data.....	3
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM	4
1.5 Penentuan Jumlah Responden.....	5
BAB II	6
ANALISIS DATA SKM.....	6
2.1 Analisis Responden	6
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan (Skala 1-4)	7
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....	9
2.4 Tren Nilai SKM.....	11
BAB III	12
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA.....	12
BAB IV.....	14
KESIMPULAN.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian ini tidak hanya mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan, peningkatan kinerja aparatur, serta inovasi pelayanan publik.

Hasil laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai sejak tahun 2018 dengan nilai IKM sebesar 88,34 (Sangat Baik), namun di tahun 2019 menurun menjadi 70,55 (Kurang Baik), artinya terjadi selisih drastis penurunan sebesar 17,79. Pada Tahun 2020 yang lalu, secara kumulatif mempunyai nilai sebesar 79,70. Skor ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Permen PAN RB No. 14 tahun 2017 dikategorikan “Baik”. Selanjutnya pada Tahun 2021 mengalami peningkatan yakni pada kategori “Baik” dengan nilai 81,27. Pada Tahun 2022 pada posisi 81,76, artinya tetap mengalami kenaikan dan mendapat predikat “Baik”. Berikut di Tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 86,00 dengan predikat “Baik”. Harapannya dengan pelayanan lebih optimal, maka di tahun 2026 mengalami peningkatan pelayanan lebih bagus lagi baik pada

Periode Triwulan 1 Tahun 2026.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner survei kukar yang disebarakan melalui link (<https://survei.kukarkab.go.id>) kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif:** Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu triwulan / per 3 bulan dalam 1 tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

memerlukan waktu selama 3 bulan dalam pelaksanaan pengumpulan data responden dan 2 minggu untuk penyusunan laporan.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017 dan jumlah sampel yang digunakan dari hasil responden survei kukar sebanyak 95 responden.

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 95 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	40	42,1%
		Perempuan	55	57,9%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	2	2,1%
		SD/Sederajat	3	3,2%
		SMP/Sederajat	5	5,3%
		SMA/Sederajat	40	42,1%
		D1/D2/D3	3	3,2%
		D4/S1	36	37,8%
		S2	5	5,3%
		S3	1	1%

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yang mencapai 57,9% sedangkan sisanya berjenis kelamin laki-laki yang mencapai 42,1%. Dari karakteristik ini dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan pelayanan didominasi oleh pemohon perempuan dan tidak ada perbedaan kualitas pelayanan publik terhadap perbedaan gender yang menunjukkan persentase gender hampir setara.

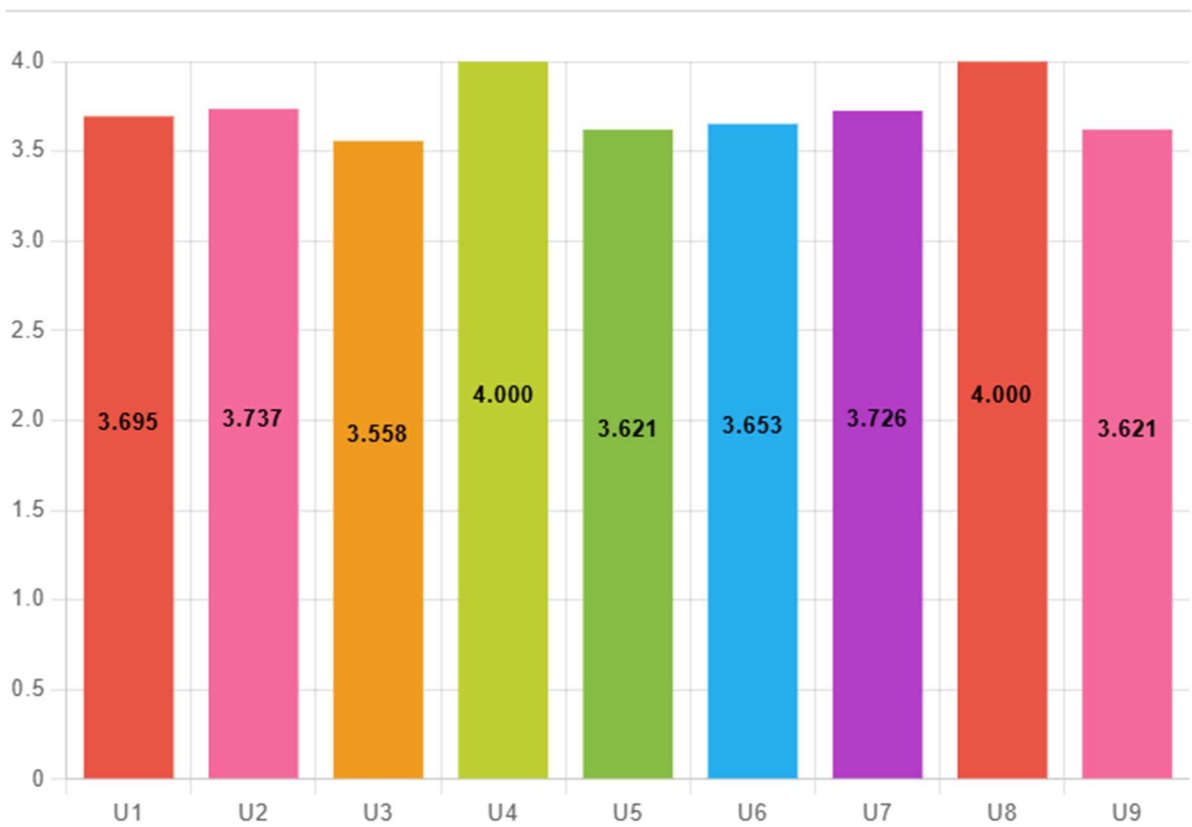
Sedangkan pada karakteristik Pendidikan responden akan memberikan informasi tingkat Pendidikan masyarakat sebagai pengguna layanan. Informasi ini penting dalam memprediksi tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Lembaga, sehingga program pelayanan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Pada karakteristik Pendidikan dari 95 responden dapat diketahui bahwa responden yang tidak bersekolah sebanyak 2 orang atau 2,1%. Selanjutnya pada SD/Sederajat berjumlah 3 orang atau 3,2%, SMP/Sederajat dengan jumlah 5 orang atau 5,3%, SMA/Sederajat yang mencapai 42,1% responden atau 40 orang, pada jenjang D1/D2/D3 berjumlah 3 orang atau 3,2%, D4/S1 dengan total responden 36 orang atau 37,8% , S2 berjumlah 5 orang atau 5,3% dan S3 mempunyai responden paling rendah yaitu 1 orang atau 1%.

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan (Skala 1-4)

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan (U1)	Pelayanan (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Produk (U5)	Kompetensi (U6)	Perilaku (U7)	Aduan (U8)	Sarpras (U9)	IKM Per Jenis Layanan
1	Penerbitan KTP	8	3,75	3,75	3,5	4	3,75	3,625	3,625	4	3,625	93,4
2.	Penerbitan KIA	3	3,333	3,667	3	4	3,667	3,333	3,333	4	3	87,04
3.	Penerbitan SKDWINI	1	4	4	3	4	3	3	3	4	3	86,11
4.	Penerbitan SKPWNI	5	3,6	3,4	3,4	4	3,6	3,8	3,2	4	3,6	90,56
5.	Penerbitan KK	17	3,471	3,706	3,412	4	3,412	3,412	3,588	4	3,471	90,2
6.	Penerbitan Akta Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Penerbitan Akta Kematian	2	3,5	3,5	3	4	3,5	3,5	3,5	4	3	87,5
8.	Penerbitan Akta Kelahiran	12	3,667	3,583	3,583	4	3,667	3,75	3,833	4	3,5	93,52
9.	Penerbitan Akta Perceraian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Aktivasi IKD	17	3,941	4	3,882	4	3,882	3,941	4	4	4	99,02
11.	Perekaman Biometrik KTP-el	4	3,25	3,5	3,25	4	3,25	3,25	3,75	4	3,5	88,19
12.	Penerbitan Kartu Keluarga WNI Online	12	3,917	3,833	3,667	4	3,667	3,75	3,917	4	3,667	95,6
13.	Penerbitan SKPWNI Online	9	3,778	3,667	3,667	4	3,556	3,778	3,778	4	3,667	94,14
14.	Penerbitan SKDWINI Online	1	3	4	4	4	4	3	4	4	4	94,44
15.	Penerbitan KIA Online	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100

16.	Penerbitan Akta Kelahiran Online	2	3,5	3,5	3	4	3	3	3	4	3	83,33
17.	Penerbitan Akta Kematian Online	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Penerbitan Akta Perkawinan Online	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rerata IKM Per Unsur			3,695	3,737	3,558	4	3,621	3,653	3,726	4	3,621	93,36
IKM Unit Layanan			93,36									
Mutu Unit Layanan			Sangat Baik									

Gambar 2. 1 Grafik Unsur Pelayanan



2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek Kecepatan Pelayanan merupakan isu yang memiliki nilai rerata terendah dari semua Unsur Pelayanan. Secara kuantitatif, dimensi ini memiliki nilai yang dapat ditingkatkan yaitu 3,558 pada skala 4.

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa kecepatan pelayanan dan kecepatan warga menerima dokumen kependudukan terkadang belum sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) yang ditetapkan.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan penyederhanaan persyaratan layanan, meningkatkan kecepatan layanan, meningkatkan keterampilan komunikasi petugas

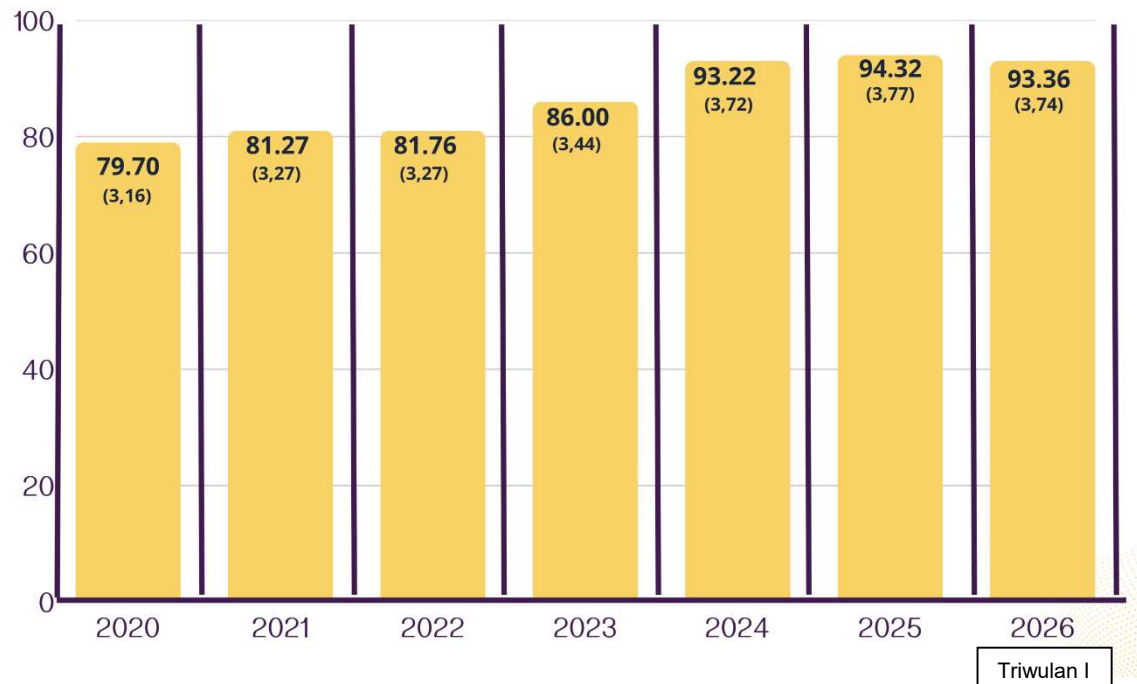
agar warga tidak mengalami kendala seperti kekurangan dokumen saat mengajukan yang menjadi penghambat warga dalam mengajukan dokumen, memperbaiki alur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna serta melakukan optimalisasi jam pelayanan tanpa jeda istirahat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Kecepatan Pelayanan (Waktu)	Evaluasi Optimalisasi waktu pelayanan tanpa jeda istirahat	Maret 2026	Kepala Dinas
		Evaluasi kendala jaringan & VPN sebagai penunjang operator dalam pelaksanaan tugas.	Maret 2026	Diskominfo

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 2. 2 Grafik Nilai Kepuasan SKM



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 6 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025 Semester II menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (2025)

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	3,806
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,790
3	Waktu Penyelesaian	3,677
4	Biaya/Tarif	3,984
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,726
6	Kompetensi Pelaksana	3,710
7	Perilaku Pelaksana	3,677
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,871
9	Sarana dan Prasarana	3,661

Berdasarkan data di atas, beberapa unsur memerlukan intervensi lanjutan untuk peningkatan angka IKM. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada hasil SKM periode 2025 Semester II. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Evaluasi Standar Pelayanan dan optimalisasi waktu pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik	Sudah	Dilakukan percepatan waktu pelayanan online yang sebelumnya 2 hari menjadi 24 jam dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.	
2	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Internal	Sudah	Dilakukan peningkatan kapasitas pelaksana dengan mengikuti Bimbingan Teknis <i>Front Office</i>	
			Dilakukan Sosialisasi Internal untuk Pelayanan Harian melalui Apel Senin	
3	Optimalisasi Sarana dan Prasarana	Belum	Dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik Kutai Kartanegara	-

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode triwulan I terhitung sejak Januari hingga Maret tahun 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 95 orang mengisi SKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode Triwulan I.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93,36. Meskipun demikian, nilai SKM Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2026.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian layanan.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 66,7%.
- Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti karena beberapa alasan, yaitu:
 - Optimalisasi Sarana dan Prasarana dilakukan oleh DPMPSTSP Kutai Kartanegara

Tenggarong, 13 April 2026

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil**



Muhammad Iryanto, S.Sos., M.Si.

NIP. 19681210 198803 1 004